

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 138 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu menjadi Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendukung perancangan peraturan;
  2. melakukan analisis dalam pengambilan keputusan;
  3. melakukan penyusunan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara melakukan rapat dan diskusi di dalam Kantor LKPP serta *Workshop/Seminar/Focus Group Discussion* (FGD)/ Konsinyering secara daring ataupun luring;
  4. melakukan konsultasi rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat;
  5. melakukan proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal; dan
  6. melakukan evaluasi proses dan hasil penyusunan rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYUSUN  
PERATURAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DI  
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR : 138 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGADAAN  
BARANG/JASA DENGAN MEKANISME KHUSUS DI IBU KOTA NUSANTARA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	1. Abdullah Azwar Anas 2. Robin Asad Suryo 3. Sarah Sadiqa 4. Gatot Pambudhi Poetranto 5. Sutan Suangkupon Lubis 6. Setya Budi Arijanta
2.	Koordinator	Emin Adhy Muhaemin
3.	Anggota	1. Suharti 2. Raden Ari Widiyanto 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih 4. Fadli Arif 5. Yulianto Prihhandoyo 6. Patria Susantosa 7. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 8. Muhammad Aris Supriyanto 9. Iwan Herniwan 10. Jhon Piter Halomoan Situmorang 11. Tatang Rustandar Wiraatmadja 12. Rusli Maryadi 13. Antonius Lambok Sihombing

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>
		14. Zulhenny
		15. Dwi Satrianto
		16. Yuyu Yulianti
		17. Theodore Sutarto
		18. Fajar Adi Hemawan
		19. Januar Indra
		20. Tjipto Prasetyo Nugroho
		21. Arif Rachman
		22. Rinaldi Morintosh
		23. Himawan Giri Dahlan
		24. Octo Army
		25. Ilvia Restu Utami
		26. Lailatul Mufarokhah
		27. Deasy Rachmawati
		28. Firmansyah
		29. Thanthawi Jauhari
		30. Satriyo Wibowo
		31. Sri Aditya Nur Pratama
		32. Gigih Pribadi
		33. Sugianto
		34. Rovazio Okiiza
		35. Seno Haryo Wibowo
		36. Ade Rizky Emirsyah
		37. Febri Kamalisa Rachman
		38. Ketsia Aprilianny Laya
		39. Linggar Lailatussa'adah Inhardy
		40. Koco Doyo Mielopo
		41. Fajar Idoanto
		42. Anita Carollin
		43. Rasmita Juliana Sitepu
		44. Ardian Hoppin Sitompul
		45. Benny Leopold Dumais
		46. Cherish Shery Desarya
		47. Asih Riska Nurmasari
		48. Andy Purwa Sejati

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>
		49. Fenita Enggraini 50. Larasati Aisyah Retno Anjani 51. Frama Nugraha 52. Lingga Sakti 53. Moch. Syamsul Alamsyah 54. Hajeng Hayu Wandhira 55. Ferisa Rahmani 56. Ikbal Amaludin 57. Melfa 58. Niken Novia Sitaresmi 59. Andi Darmawan 60. Eva Sinaga 61. Andi Rannualdi 62. Annisa Putri 63. Yasmine Permata Sari 64. Wahyudi Wirja 65. Dedi Setiawan 66. Fairuz Nawfal Hamid 67. Maharani Okifitriana

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS